

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2011  
NOMOR : 0001/077-01.1.01/00/2011

REVISI KE-5

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011
4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-077.01.01-0 /AG/2010, STAP-077.01.02-2 /AG/2010, STAP-077.01.06-0 /AG/2010, STAP-077.01.07-0 /AG/2010

5. Dasar lain

3. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
  2. Unit Organisasi : (01) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
  3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
  4. Kode>Nama Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI
- Sesbesar : Rp. 287.996.206.000 ( \*\*\*DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH\*\*\* )

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	287.996.206.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA I (018) Rp. 287.996.206.000 3.
2. 4.

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Jakarta, 20 Desember 2010  
A.N. MENTERI KEUANGAN RI  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



AGUS SUPRIJANTO  
NIP. 195308141975071001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**  
**NOMOR : 0001/077-01.1.01/00/2011**

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

---

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	185.896.206.000
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp.	185.896.206.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	102.100.000.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	47.100.000.000
03.04	PERADILAN	Rp.	55.000.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**  
**NOMOR : 0001/077-01.1.01/00/2011**

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	115.600.000.000
077.01.01.3365	Penyelenggaraan Adm Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	Rp.	2.861.600.000
077.01.01.3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp.	35.113.780.000
077.01.01.3367	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	Rp.	27.978.471.000
077.01.01.3368	Penyelenggaraan Penelitian Isuisu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Rp.	8.818.268.000
077.01.01.3369	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	Rp.	40.827.881.000
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	70.296.206.000
077.01.02.3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.	58.000.000.000
077.01.02.3371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Rp.	12.296.206.000
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp.	55.000.000.000
077.01.06.3372	Penanganan Perkara Puu, Skn, Phpu Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya	Rp.	55.000.000.000
077.01.07	Program Kesadaran Berkonstitusi	Rp.	47.100.000.000
077.01.07.3373	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi Mk	Rp.	47.100.000.000